

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sejak ditetapkannya Undang – Undang Pemerintah Daerah No 32 Tahun 2004 dan peraturan pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 yang mengatur tentang pengelolaan ekonomi daerah dan menekankan pelaksanaan masalah prioritas wajib untuk melindungi masyarakat dan meningkatkan taraf hidup, untuk melaksanakan pengelolaan ekonomi daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar salah satunya di bidang pendidikan. Salah satunya adalah Bantuan Operasional Sekolah (BOS) (Husnun, 2014).

Bantuan Operasional Sekolah (BOS) menjadi suatu program dalam pendidikan pemerintah dan program nasional yang memiliki anggaran cukup besar dan berkaitan langsung dengan hidup masyarakat luas. Dana BOS ini merupakan bantuan yang diberikan kepada setiap siswa lalu sekolah mengelola untuk mendanai biaya operasional kegiatan belajar mengajar (Anggraini, 2015). Tujuan dari dana BOS adalah untuk mengurangi beban masyarakat atas biaya wajib belajar 12 (Dua Belas) tahun. Selain itu, dana BOS juga meringankan standar layanan bagi sekolah (Umi, 2018). Program dana BOS digunakan untuk pembelian barang konsumsi, menyediakan langganan terkait daya dan jasa, memberikan dana perawatan sarana dan prasarana, serta pembiayaan honorer.

Sekolah memiliki posisi dalam memutuskan dalam pemakaian anggaran dana BOS, sebab sekolah adalah lembaga yang terlibat secara real saat melakukan pengelolaan anggaran dana BOS. Untuk memudahkan pemantauan, sekolah harus melaporkan penerimaan dan pembayaran secara lengkap (Shilvia, 2021). Menurut Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Pendanaan Pendidikan Nasional tahun 2003, pengelolaan dana pendidikan didasarkan pada prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik. Penyelenggaraan sumber daya pendidikan negara dan masyarakat berdasarkan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Dengan penggunaan dan pengelolaan dana yang transparan, masyarakat bisa mendapatkan informasi tentang biaya sekolah yang digunakan (Ammar&Bustaman, 2019).

Dasar pengelolaan dana BOS ialah alur sistematis yang dipakai dalam pemanfaatan dana BOS yang dikeluarkan oleh Kemendikbud sebagai penanggung

jawab khusus dalam pelaksanaan dan pengelolaan program dana BOS (Ismi, 2016). Sekolah menerapkan Manajemen Berbasis Sekolah agar sekolah dapat mengelola dengan terpercaya dan transparan, makna transparan untuk pengelolaan berarti bahwa pengelolaan dana BOS dipahami oleh masyarakat dan wali murid, dan secara akuntabel artinya pihak sekolah dapat mempertanggungjawabkan penggunaannya kepada pemerintah dan masyarakat (Yuliani, 2019).

Menurut Trisnawati (2018) Akuntabilitas adalah kewajiban untuk mempertanggungjawabkan kegiatan dan tindakan terhadap semua orang yang mempunyai suatu hak dan kewajibannya dalam memperoleh informasi atau tanggung jawab. Akuntabilitas merupakan kondisi dimana orang lain menilai kualitas kinerjanya dalam mencapai suatu tujuan dalam menjalankan suatu tanggung jawab (Farid, 2017).

Selain akuntabilitas, pada pengelolaan transparansi juga diperlukan. Transparansi merupakan sebuah akses informasi bagi masyarakat. Transparansi juga harus ada pada saat melaporkan pengadaan barang sebab Lembaga Pendidikan pun wajib memberikan informasi mengenai penggunaan anggaran pada wali siswa dan masyarakat secara umum supaya mereka memahami aliran dana dan penggunaannya. Bentuk transparansi yang dilakukan sekolah harus terlaksana dengan baik dan tepat dalam hal akuntansinya (Solihat&Sugiharto, 2009).

Sangatlah penting akan adanya transparansi dan akuntabilitas dalam pemakaian dana BOS pada masyarakat umum sebab hal tersebut menjadi hal yang paling disoroti. Masyarakat adalah bagian yang memegang peranan penting dalam berjalannya pendidikan (Yogi, 2013). Pada SMK di Kecamatan Besuki penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam hal keuangan sekolah dan pengelolaan dana BOS masuk dalam kategori belum terlaksana dengan baik, serta terjadi keterlambatan penyaluran dana BOS (Responden, 28 mei 2022). Oleh karena itu, pihak sekolah tidak ingin masyarakat mengetahui laporan pengelolaan dana BOS, dan hal ini dapat menurunkan kepercayaan masyarakat. Setidaknya sikap tranparansi dan akuntabilitas dalam pemakaian dana BOS menunjukkan

bahwa auditor belum atau belum melakukan kegiatan audit terkait dana BOS. (Ilham, 2016).

Dari penjelasan masalah diatas maka peneliti berkeinginan melakukan penelitian tentang **“Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Terhadap Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMK di Kecamatan Besuki”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, maka rumusan masalah yang dapat disusun adalah sebagai berikut :

1. Apakah akuntabilitas berpengaruh signifikan terhadap Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah ?
2. Apakah transparansi berpengaruh signifikan terhadap Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disusun, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menjelaskan pengaruh akuntabilitas terhadap Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah.
2. Untuk menjelaskan pengaruh transparansi terhadap Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi Peneliti

Hasil Penelitian ini diharapkan bisa dapat memberikan wawasan serta ilmu mengenai pengaruh akuntabilitas,transparansi,dan partisipasi terhadap efektivitas pengelolaan dana BOS.

2. Bagi Sekolah

Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi saran serta bahan untuk pertimbangan sebagai dasar pengambilan keputusan untuk meningkatkan pengelolaan anggaran keuangan sekolah

3. Bagi Peneliti Lain

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi serta bahan rujukan untuk penelitian selanjutnya agar bisa dikembangkan untuk memperluas objek penelitian.